



Klithih dan Perkembangan Kota

MELIHAT fenomena aksi kejahatan remaja di jalanan (klithih) rasanya jengkel juga. Barang siapa. Tak jarang reaksi masyarakat dengan main hakim sendiri yang sebenarnya tidak dibenarkan. Demikian pula dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang memberikan perhatian khusus hingga membentuk Pokja.

Kriminalitas jalanan yang dilakukan remaja sudah terjadi sejak tahun 1990-an, lewat Geng Remaja. Kemudian, tahun 2000-an mulai muncul tawuran pelajar yang membuat gerah masyarakat pula termasuk Walikota Yogyakarta waktu itu. Masih dari sumber yang sama bahwa pemberitaan mulai marak tentang klithih itu pada tahun 2016 dimana tercatat ada 43 kasus yang melibatkan remaja. Dua tahun terakhir, kejahatan jalanan ini terus meningkat. hukuman tegas tidak membuat efek jera bagi mereka.

Perkembangan Kota

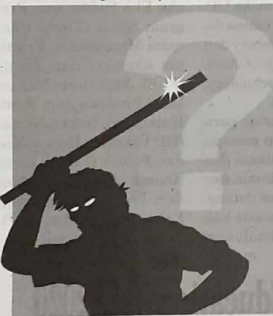
Kota Yogyakarta dan Sleman menjadi kota/kabupaten yang sangat tinggi dinamika sosialnya. Selain kampus, di kedua wilayah ini juga menjamur pusat perekonomian dan hiburan yang berdampingan dengan rumah-rumah penduduk. Hiruk pikuknya kota menjadi daya tarik wisata serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Derasnya perkembangan kota secara fisik telah meninggalkan pemerataan perekonomian warganya. Ada yang berlari kencang tetapi banyak pula yang hanya menjadi penonton sehingga rasio gini DIY masih cukup tinggi.

Ruang fisik yang dibutuhkan anak-anak semakin sempit karena semakin banyak lahan menjadi bangunan. Ruang ekspresi anak-anak semakin terbatas dan tergantikan tugas-tugas sekolah yang menumpuk. Remaja yang sedang mencari identitas tak memiliki wadah yang bisa mengasah dan mendalami untuk bisa menemukan jati dirinya. Masa remaja justru digerogeti oleh

Dimas Ariyanto

'dunia mini' yang seringkali meminggirkan hati nurani. Anak-anak di DIY yang mengalami krisis identitas itu menjadi semakin frustrasi.

Alih-alih ingin ikut berpartisipasi mengisi ruang-ruang sosial ekonomi dan budaya tapi justru yang terjadi tidak berdaya karena modal yang tidak sama baik tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Sudah seharusnya 'Pokja Klithih' mampu mendorong pengarusutamaan hak-hak anak melalui optimalisasi kebijakan Propinsi Layak Anak dan Kota/Kabupaten Layak Anak.



KR-JOKO SANTOSO

DIY sebagai Provinsi Layak Anak (Provilla) telah memperoleh predikat Utama dari KPPPA RI dan Kota Yogyakarta serta Kabupaten Sleman berpredikat Nindya pada tahun 2019. Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi pembangunan wilayah dengan perspektif hak anak yang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak. KLA berisi 6 komponen besar yaitu Kelembagaan PUHA, kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Juga kluster pendidikan, pemanfaatan wak-

tu ruang dan kegiatan Senin budaya, kluster terakhir adalah langkah-langkah perlindungan khusus.

Dari Hilir

Strategi KLA akan berjalan optimal apabila seluruh stakeholder terutama OPD mampu memahami dan mengimplementasikan dalam kebijakan dan program kegiatan. Permasalahan kejahatan jalanan remaja tidak dapat diselesaikan hanya dari hilirnya saja. Seperti ditegaskan Sri Sultan HB X bahwa upaya menangani klithih harus dimulai dari akar penyebabnya. Keluarga menjadi salah satu faktor saja. Banyak faktor yang menjadi kebutuhan anak agar dapat tumbuh berkembang secara optimal.

Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali implementasi Provilla dan KLA karena sebagai strategi pengarusutamaan hak-hak anak yang holistik dan integratif ternyata masih menyisakan permasalahan remaja yang melakukan kejahatan jalanan tersebut. Apakah Pemimpin Daerah telah memasukkan Provilla atau KLA sebagai salah satu prioritas pembangunan yang didukung dengan kebijakan, program dan kegiatan? Apakah masing-masing OPD penanggungjawab indikator KLA telah benar-benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal? Apakah media memberikan kontribusi positif terhadap informasi yang layak bagi anak-anak? Bagaimana peran dunia usaha mendukung DIY menjadi Provilla dan juga KLA bagi kota dan kabupaten?

KLA dapat menjadi pisau bedah atas fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan remaja. Karena KLA merupakan strategi implementasi pengarusutamaan hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak yang berisi hak-hak anak untuk menyelesaikan permasalahan klithih secara holistik dan integratif serta transformatif. □ - e

*) Dimas Ariyanto

Konsultan Hak Anak Yayasan Satunama dan Fasilitator Nasional KLA

Netral

Biasa

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PMPPA			

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005